

BAB IV

KESIMPULAN

Melalui penelitian ini didapatkan bukti bahwa perdebatan dua gagasan benar terjadi di dunia kontemporer, seperti apa yang telah di ramalkan Samuel Huntington. Setelah dunia lepas dari perdebatan idologi yang berimplikasi pada pecah perang antara kerajaan-kerajaan, kini dunia masuk pada pertarungan baru antar identitas. Identitas global dan agama menjadi yang paling menjual dalam pertarungan identitas. Perdebatan identitas yang bersumber dari ranah pikiran tidak hanya dimunculkan oleh aktor-aktor atas seperti negara, pelaku pemerintah, namun juga dari ekonom, pegiat sosial, sampai masyarakat. Penguasaan pada ranah pikiran mampu dilakukan oleh siapa saja tidak dibatasi oleh aktor tertentu maupun ruang tertentu. Hanya dibutuhkan “rezim kebenaran” dalam suatu relasi untuk bisa yang satu menguasai yang lain.

Kecenderungan keterlibatan gagasan global dan agama menjadi yang paling mencolok karena keduanya sama-sama berasal dari hal-hal yang paling mendasar yaitu keyakinan. Gagasan global mengusung dasar-dasar kemanusiaan sampai pada memisahkan urusan publik dan privat dengan jelas. Agama pernah dimanfaatkan dengan cara yang salah dan berakibat pada banyak terjadinya kejahatan kemanusiaan. Atas dasar inilah kemudian urusan agama bukan lagi menjadi masalah bersama namun masalah per-individu dengan Tuhan mereka. Sehingga apapun yang dilakukan individu jika menyangkut keagamaan tidak akan dianggap menjadi masalah. Namun jika individu lain memperlakukan apa yang dilakukan individu lain tentang keagamaan tersebut maka ia akan balik dipermasalahan karena mengusik nilai-nilai kemanusiaan. Mereka yang mendukung gagasan ini masuk pada kelompok *the West* atau sebutan lainnya *international society*. Mereka berkepentingan untuk membuat negara-negara lain memiliki pandangan yang sama. Hal ini bertujuan agar

memudahkan langkah mereka untuk bisa mencapai keberhasilan pembangunan bersama.

Berbeda dengan *the West*, di Indonesia hal-hal tersebut tidak berlaku. Indonesia dengan masyarakat yang masih sangat heterogen memegang hukum adat dengan baik. Dengan mayoritas penduduk Islam, nilai-nilai Islam menjadi dasar hukum yang dipercaya oleh mayoritas masyarakat. Sehingga baik sosial hingga perundang-undangan tidak jauh dari nilai Islam. Jadi ketika ada hal-hal yang menyangkut isu keagamaan akan menjadi sangat riskan dipermasalahkan di Indonesia. Mereka yang mendukung untuk tidak adanya campur tangan berlebih atas nilai-nilai yang mereka pegang kemudian disebut sebagai konservatif lokal berbasis Islam—konservatis Islam. Dengan sifat dasar konservatif yang tidak menginginkan adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan bersosial maupun politik maka penting bagi mereka untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini.

Kepentingan-kepentingan yang dimiliki baik dari sisi *the West* maupun Indonesia keduanya sama-sama bisa dimengerti melalui konsep pembentukan kepentingan menurut konstruktivisme. Menurut teori konstruktif kepentingan dibentuk berdasarkan identitas yang dimiliki suatu aktor, bukan sebaliknya. Melalui pandangan konstruktivis dunia adalah tempat untuk *share of idea* sehingga tiap aktor akan selalu berhubungan. Sehingga baik ide dari global maupun konservatif berlomba untuk mempertahankan dan membagikan gagasan mereka.

Penelitian ini juga memberikan fakta betapa keras usaha gagasan-gagasan global untuk masuk ke Indonesia. Baik gagasan dari hak asasi manusia sampai demokrasi. Melalui pendidikan, lembaga non-pemerintah yang mengusung kesejahteraan lingkungan, kemanusiaan, non-diskriminasi untuk

wanita, dan lain sebagainya *the West* berusaha melakukan diskursus gagasan-gagasan mereka. Gagasan global juga berusaha masuk pada kasus pelecehan agama 2017 yang dilakukan Ahok dengan membawa poin kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Bahkan pada akhirnya mereka memunculkan isu kejahatan kemanusiaan–kejahatan politik–karena suara mereka mengenai kebebasan berpendapat tidak diindahkan. Untuk menunjukkan kepedulian mereka pada demokrasi di Indonesia, international society mengirimkan advokat-advokatnya untuk mengawal langsung jalannya peradilan untuk Ahok, aksi damai untuk menuntut keadilan bagi Ahok juga dilakukan di berbagai negara, kemudian beberapa lembaga pemerintah the West juga mengangkat isu ini ke parlemen-parlemen mereka.

“Perlawanan” juga nampak dari kubu konservatif lokal yang membawa nilai Islam. Aktor-aktor yang mewakili konservatis Islam menyebarkan apa yang mereka yakini melalui buku, tulisan-tulisan di media sosial dan berita, melalui khotbah/ dakwah/ ceramah. Mereka juga ada di sekolah-sekolah seperti pondok pesantren, yayasan, dan *partnership*. Tidak jarang mereka memasang baliho dan spanduk-spanduk besar di pinggir jalan menyerukan untuk memerangi gagasan-gagasan global seperti liberalisme-kapitalisme. Tidak jarang juga ditemukan seruan-seruan bahwa nilai-nilai demokrasi yang ada sesungguhnya tidak tepat hingga tidak semestinya diterapkan di Indonesia. Masalah ini yang terlihat sangat jelas pada masalah pelecehan agama yang dilakukan Ahok. Kaum konservatis bukan hanya mampu memenangkan suara masyarakat, dengan bukti banyaknya manusia yang turun langsung dalam aksi demonstrasi di Jakarta dan lokasi-lokasi lain untuk menuntut Ahok. Belum lagi persekusi yang diberikan kelompok konservatif, dimana mereka mengancam untuk melakukan jihad

memerangi mereka yang membela Ahok meski itu adalah pemerintah. Ditambah lagi partai politik yang ada tidak melakukan tanggapan yang berarti pada tindakan konservatis Islam tersebut. Dengan desakan masyarakat yang tinggi beserta ancaman-ancamannya dan *blow up* media, pemerintah tidak bisa membiarkan kegaduhan ini berlangsung lama karena benar-benar bisa mengancam kestabilan sosial.

Melihat dari bagaimana perbandingan kekuatan global dalam menghadapi norma lokal, bisa disimpulkan bahwa norma lokal mampu lebih baik dalam membangun relasi dengan sistem yang ada di Indonesia. Baik media masa yang kemudian mampu membentuk opini masyarakat, yang berakhir memenangkan simpati mereka, kemudian mendorong masyarakat untuk memberikan *demand* ke pemerintah untuk segera mengakhiri permasalahan tersebut. Dimana tiga aktor penting dalam pembuatan kebijakan suatu negara tidak dapat dikuasai oleh penggagas norma global. *International society* memang menarik simpati masyarakat tapi mayoritasnya bukan masyarakat Indonesia. Mereka juga memenangkan simpati pemerintah atau parlemen, tapi bukan milik Indonesia. Meskipun global menang dalam penguasaan media, namun dua dari tiga aspek ia kalah. Sehingga sulit bagi gagasan global untuk mempengaruhi jalannya hukum di Indonesia.

Hasil perdebatan dari kedua identitas besar tersebut yang itu adalah kekalahan *international society* atau gagasan global dalam mempengaruhi hukum di Indonesia dalam kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok. Memberikan dua poin penting dalam kajian pertarungan norma ini. *Poin pertama* adalah untuk berkuasa atau menguasai aktor lainnya, maka aktor harus mampu memenangkan sistem-sistem yang ada dalam suatu ruang relasi. Ketika berbicara keinginan untuk menguasai aktor lainnya maka, si aktor harus mampu lebih

unggul dari semua aspek yang ada di salam aktor lainnya tersebut. *Poin kedua* adalah kekuasaan dibangun melalui kebenaran, dan kebenaran mampu dibentuk oleh tiap aktor dan menjadi suatu rezim yang diakui. Ketika membicarakan kepentingan-kepentingan aktor maka akan berhubungan dengan bagaimana mereka mewujudkan atau mencapai kepentingan-kepentingan tersebut. Karena identitas membentuk kepentingan, dan identitas bekerja di ranah metafisik, ranah ide maka menguasai pikiran manusia adalah kunci utama untuk berkuasa. Bagaimana cara berkuasa melalui pikiran adalah menggunakan diskursus keyakinan, menggunakan ketakutan-ketakutan manusia terhadap hal-hal di luar batas fikir mereka. Bahwa memang ada kekuatan-kekuatan yang jauh lebih tinggi dibanding negara maupun super-negara, yaitu pada kasus ini adalah Tuhan. Dengan diskursus keyakinan tersebut kaum konservatis mampu memenangkan *battle of norms*.

Masalah perdebatan norma dan atau diskursus gagasan sangat relevan untuk di kajian dalam hubungan antar negara. Ini dikarenakan pergerakan ide atau diskursus selalu melampaui batas wilayah. Selain itu perubahan identitas dan pikiran manusia jauh lebih fluktuatif dan sulit untuk di kontrol di banding dengan hal-hal fisik lainnya. Dengan perubahan berfikir/ identitas manusia dan memang akan cenderung terus berubah maka hubungan antar manusia akan jauh lebih kompleks dan pasti pada akhirnya berdampak pada hubungan antar negara. Karena individu atau masyarakat merupakan dasar dari terjalinnya hubungan antar negara. Dalam studi kasus penelitian ini relevansinya makin terlihat karena keterlibatan *international society* yang mencoba untuk melakukan diskursus gagasan mereka untuk mempengaruhi jalannya hukum di Indonesia. *International society* merupakan aktor baru dalam

hubungan antar negara di era kontemporer. Meskipun baru namun *international society* mampu membawa pengaruh yang besar dalam hubungan negara. Berangkat dari pemikiran yang sama terhadap isu-isu non tradisional, individu-individu dari berbagai wilayah dunia mampu tergabung maupun menggabungkan diri mereka ke dalam satu wadah dan berusaha mempengaruhi aktor lainnya agar sesuai dengan mereka. Buktinya pada kasus pemburuan hiu untuk diambil siripnya. Isu ini diangkat setelah banyak masyarakat dari negara berbeda memiliki kekhawatiran yang sama terkait punahnya hiu, kemudian mereka membentuk komunitas hingga organisasi dan membentuk peraturan/ kesepakatan mengenai pemburuan hiu. Pada akhirnya mereka mampu mempengaruhi negara-negara untuk menyetujui dan menerapkan peraturan tersebut.

Kembali pada studi kasus Ahok, terlihat melalui penelitian ini ada usaha-usaha yang dilakukan *internasional society* untuk mempengaruhi jalannya hukum di Indonesia. Dengan adanya usaha mempengaruhi jalan hukum inilah mengapa isu diskursus gagasan sangat relevan dalam kajian hubungan internasional.

Namun sayangnya meski penelitian ini menyajikan analisa kegagalan diskursus gagasan global, masih ada kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Kurangnya penyajian data akurat mengenai bagaimana *international society* bisa kalah melawan konservatis Islam Indonesia menjadi salah satu kelemahan penelitian ini. penelitian ini belum memberikan data yang pasti mengenai perbandingan jumlah pendukung kasus Ahok dari sisi global, dan para penuntutnya dari sisi konservatis. Ini dikarenakan tidak ada sumber akurat yang dapat memberikan angka atau jumlah pasti berapa yang mendukung dan yang tidak. Selain itu juga terdapat kelemahan pada penyajian data aktor pemerintah dan

pengusaha mana saja yang mendukung dan menolak kasus Ahok. Hal ini sama dikarenakan minimnya sumber terpercaya yang menyajikan data tersebut. dikarenakan hal-hal tersebut penelitian ini menjadi terlihat kurang objektif.

Namun pada akhirnya penelitian ini mampu menjawab pertanyaan mengapa bentrok gagasan bisa terjadi pada kasus keagamaan di Indonesia yang berimplikasi pada kekalahan salah satu wacana. Berdasarkan konsep rezim kebenaran ternyata wacana yang diberikan oleh *international society* tidak diakui “kebenarannya” sehingga tidak mampu menjadi suatu rezim yang diikuti oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan wacana global tidak mampu menghimpun dukungan, baik dari masyarakat sampai dengan aktor pemerintah. Sehingga kekuatan mereka untuk menurunkan urgensi kasus Ahok sangat kurang.

Kekalahan gagasan global dalam mempegaruhi hukum di Indonesia merupakan bukti adanya *counter discourse* yang dilakukan kelompok konservatis lokal Indonesia, dengan cara membentuk rezim kebenaran yang didukung oleh sistem yang ada. Dukungan ini menjadikan kasus pelecehan agama menjadi sangat *urgent* dan butuh untuk diselesaikan dengan segera. Dengan begitu tidak sulit bagi konservatis untuk mengawal jalannya hukum di Indonesia.